

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana strata satu (S1)



OLEH :
YUDA WAHYU RAMADANI
15136045/2015

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

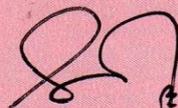
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2015-2018
Nama : Yuda Wahyu Ramadani
NIM/TM : 15136045/2015
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

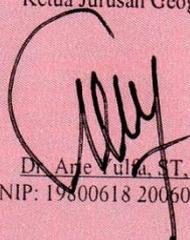
Disetujui Oleh :

Pembimbing



Sri Mariya, S.Pd, M.Pd
NIP : 19880503 201504 2 003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Geografi



Dr. Arif Vula, ST, M.Sc
NIP: 19800618 200604 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, 29 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN
2015-2018**

Nama : Yuda Wahyu Ramadani
TM/NIM : 2015/15136045
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

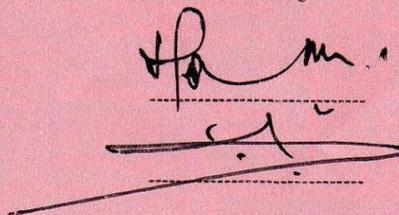
Tim Penguji :

Nama

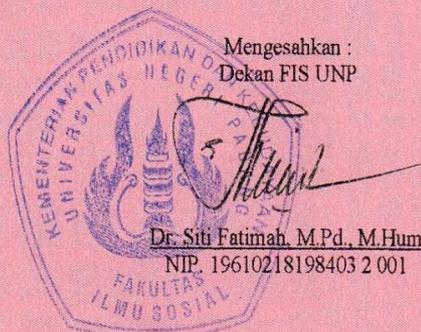
Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji : Dr. Nofrion, M.Pd

Anggota Penguji : Dr. Khairani, M.Pd



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuda Wahyu Ramadani
NIM/BP : 15136045/2015
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :
“Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, S1, M.Sc
NIP. 19800618 200604 1003



ag, Februari 2020
ang menyatakan

Yuda Wahyu Ramadani
NIM. 15136045/2015

ABSTRAK

Yuda Wahyu Ramadani (2015) : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Angka partisipasi sekolah (APS), 2) angka partisipasi kasar (APK), 3) angka partisipasi murni (APM) dan 4) Keterkaitan jumlah prasarana pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder (ADS). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ini diperoleh dari (BPS) dan (Kemendikbud) Kabupaten Sijunjung.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Rata-rata APS SD 99,13%, APS SLTP 90,53% dan APS SLTA 70,77% setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 2) Rata-rata APK SD 107,79%, APK SLTP 82,32% dan APK SLTA 73,52% setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 3) Rata-rata APM SD 96,46%, APM SLTP 79,11% dan AMP SLTA 55,87% setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 4) Keterkaitan jumlah prasarana pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018 yaitu semakin banyak jumlah prasarana pendidikan atau jumlah sekolah maka cenderung APS, APK, APM juga akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin sedikit jumlah sekolah maka APS, APK, APM cenderung semakin rendah dan jumlah prasarana pendidikan berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan dan APS, APK, APM juga akan berkurang semakin tinggi tingkat jenjang.

Kata kunci : Angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM), Prasarana Pendidikan.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-nya beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepadajunjung kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018"**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, masukan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak demi kelancaran penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan FIS beserta staf karyawan FIS Universitas Negeri Padang.
2. Arie Yulfa, ST, M.Sc selaku Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Geografi FIS Universitas Negeri Padang.
3. Sri Mariya, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta, terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya.
4. Dr. Nofrion, M.Pd dan Dr. Khairani, M.Pd selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan do'a serta materi dan non materi.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, arahan, dorongan serta bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. Amin.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis terbuka sepenuhnya atas segala kritikan dan saran yang membangun guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, Januari 2020

Yuda Wahyu Ramadani

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Penduduk	10
2. Pendidikan	11
3. Partisipasi	14
4. Partisipasi Pendidikan	16
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	19
C. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Jenis Data, Sumber Data, Alat Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	27
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	27
2. Kondisi Fisik.....	28
3. Kondidi Sosial	31
B. Hasil Penelitian	32

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	33
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	42
3. Angka Partisipasi Murni (APM) Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	51
4. Keterkaitan Jumlah Prasarana Pendidikan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS, APK, APM) Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	61
C. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN 1	80
LAMPIRAN 2	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Hasil Penelitian Yang Relevan	20
Tabel 2. Variabel dan Sumber Data Penelitian	24
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2015	31
Tabel 4. Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015	32
Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	33
Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	36
Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	39
Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	43
Tabel 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	45
Tabel 10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	48
Tabel 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	51
Tabel 12. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	54
Tabel 13. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018.....	57
Tabel 14. Jumlah Sekolah SD, SLTP, SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	33
Gambar 3. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahu 2015-2018	35
Gambar 4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	38
Gambar 5. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	41
Gambar 6. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	44
Gambar 7. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	47
Gambar 8. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	50
Gambar 9. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	53
Gambar 10. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	56
Gambar 11. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018	59
Gambar 12. Peta Jumlah Sekolah Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung	63
Gambar 13. Peta Jumlah Sekolah SD dan APS SD, APK SD, APM SD Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung	65
Gambar 14. Peta Jumlah Sekolah SLTP dan APS SLTP, APK SLTP, APM SLTP Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung	66
Gambar 15. Peta Jumlah Sekolah SLTA dan APS SLTA, APK SLTA, APM SLTA Setiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan untuk suatu wilayah yang ada di Indonesia akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya (SDM) yang berkualitas. Dimana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut salah satunya melalui jalur pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus di upayakan dengan memberikan kesempatan untuk semua penduduk agar dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk pembangunan manusia karena dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas sebagai penggerak utama ekonomi suatu negara dapat di peroleh dengan cara menempuh jalur pendidikan.

Menurut Purwadi dan Siswantari, (2002). Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan yaitu pemberian kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus bersifat keadilan. Tinjauan keadilan tanpa membandingkan jenis kelamin, lokasi geografis, dan antara penduduk kaya dan miskin. Yang menjadi masalah utama masyarakat Indonesia tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi terutama dari SLTP ke jenjang SLTA khususnya usia 16-18 tahun karena kondisi ekonomi (Amaliah, 2015).

Pendidikan dasar di Indonesia di tuangkan dalam pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014, dimana dalam RPJM tersebut salah satu cara untuk pembangunan manusia Indonesia adalah dengan tercapainya pendidikan

dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dan turunnya angka kesenjangan pendidikan antar wilayah. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjamin hak atas pendidikan dasar pada setiap warga negara Indonesian dan pemerintah wajib membiayainya dengan memprioritas anggaran 20% untuk pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia distribusi pendidikan lebih memberikan perhatian pada indikator kuantitatif untuk melihat tingkat pemerataan pendidikan. Indikator yang sering dipakai untuk melihat pemerataan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah yaitu perbandingan jumlah murid dan jumlah penduduk usia belajar. Dalam buku penyusunan indikator sosial untuk menghitung angka partisipasi sekolah ada 3 indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) (BPS, 1994). APS adalah perbandingan jumlah anak usia tertentu yang sedang sekolah (tanpa mempedulikan jenjang pendidikan) yang di tempuh. APK adalah perbandingan jumlah siswa (tanpa mempedulikan umur) dengan penduduk usia sekolah tertentu dan APM adalah perbandingan antar jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk sekolah jenjang tertentu.

Di Indonesia pada data badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2016 secara rata-rata lama sekolah umur 15 tahun ke atas di Indonesia baru mencapai 7,95 tahun atau rata-rata pendidikan penduduk Indonesia baru mencapai atau hampir menamatkan pendidikan hingga kelas VIII (SLTP kelas

II) yang berarti masih ada kurang selisih 1 tahun dari target pendidikan dasar 9 tahun. Kalau dilihat dari angka partisipasi (APS) Indonesia pada tahun 2016 pencapaian di jenjang SD mencapai 99,09%, SLTP mencapai 94,88% dan SLTA 70,83%. Sedangkan kalau di lihat dari pencapaian angka partisipasi kasar (APK) Indonesia pada tahun 2016 pencapaian di jenjang SD mencapai 106,44%, SLTP mencapai 101,05% dan SLTA 81,95%. Dan untuk angka partisipasi Murni (APM) Indonesia pada tahun 2016 pencapaian di jenjang SD mencapai 93,73%, SLTP mencapai 76,29% dan SLTA 61,20%. Untuk angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2016 masih tinggi, menurut UNICEF sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yaitu sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD), 1,9 juta anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sedangkan untuk tingkat anak usia sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) pada tahun 2016 menurut Susenas angka putus sekolah SLTA di Indonesia sebanyak 4,6 juta anak.

Sasaran untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dapat didukung dengan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Wujud pemerintah dalam hal ini yakni dengan merencanakan berdirinya sekolah-sekolah baru sebagaimana tujuan pemerataan pendidikan dengan penyediaan bangunan sekolah untuk dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. Neilson and Zimmerman, (2014) mengemukakan bahwa pembangunan sekolah di daerah yang tergolong miskin dapat memicu meningkatnya angka pendaftaran siswa. Sehingga dengan upaya

penyediaan akses sekolah terdekat dapat memicu partisipasi penduduk untuk mengikuti pendidikan.

Di Provinsi Sumatera Barat kesempatan memperoleh pendidikan masih belum merata terutama pada jenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), dengan kata lain masih banyak penduduk di Sumatera Barat yang belum mengenyam pendidikan khususnya pada pendidikan formal. Persoalan yang mendasar karena tidak adanya biaya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, kurangnya pelayanan dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai, persoalan lain karena pengelolaan anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil survai sosial ekonomi (Susenas) badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2016 secara umum pencapaian angka partisipasi sekolah (APS) di Provinsi Sumatera Barat usia sekolah dasar (SD) mencapai 92,17%, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 74,96% dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 66,89%. Untuk angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) mencapai 108,42%, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 104,08% dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 90,07%. Dan untuk angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) mencapai 94,84%, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 78,49% dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 69,04%. Di Provinsi Sumatera Barat untuk angka partisipasi sekolah (SLTP dan SLTA) pada daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten. Untuk

itu dalam rangka meningkatkan APS nasional daerah kabupaten perlu mendapat perhatian lebih baik.

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya), Kabupaten ini menjadi Kabupaten tersempit kelima di Sumatera Barat. Saat ini, Kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa. Daftar nama Kecamatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat : Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII / Tujuh, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus dan Kecamatan Tanjung Gadang.

Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung tahun 2013 pada jenjang pendidikan SD 96,92%, SLTP 86,20%, dan SLTA 68,53%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 124,49%, SLTP 95,8%, dan SLTA 77,86%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 93,5%, SLTP 67,87%, dan SLTA 56,83%. Tahun 2014 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 96,29%, SLTP 88,74%, dan SLTA 76,31%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 117,13%, SLTP 103,08%, dan SLTA 73,59%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 93,34%, SLTP 80,56%,

dan SLTA 61,22%. Tahun 2015 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 99,62%, SLTP 96,48%, dan SLTA 65,64%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 112,09%, SLTP 105,08%, dan SLTA 76%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 94,13%, SLTP 80,77 %, dan SLTA 58,96%. Tahun 2016 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 99,05%, SLTP 89,43%, dan SLTA 72,16%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 105,84 %, SLTP 107,23%, dan SLTA 80,49%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 93,44%, SLTP 82,15%, dan SLTA 64,62%. Tahun 2017 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 99,65%, SLTP 90,04%, dan SLTA 75,37%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 104,68%, SLTP 108,52%, dan SLTA 88,92%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 91,56%, SLTP 83,13%, dan SLTA 71,01% (BPS Sijunjung 2017).

Dari data di atas pada angka partisipasi sekolah (APS) dapat terlihat fenomena dimana setiap jenjang pendidikan mengalami penurunan yang signifikan. Dimana hampir 50% penduduk Kabupaten Sijunjung yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA). Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung baru mencapai 7,4 tahun.
2. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sijunjung
3. Masih tingginya angka putus sekolah
4. Tidak meratanya pendidikan antar wilayah
5. Tidak adanya biaya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
6. Pelayanan dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan fokus pada masalah angka partisipasi sekolah setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015-2018. Pemilihan Kabupaten Sijunjung ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana angka partisipasi sekolah setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015-2018.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Sejauh mana angka partisipasi sekolah (APS) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018?
2. Sejauh mana angka partisipasi kasar (APK) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018?

3. Se jauh mana angka partisipasi murni (APM) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018?
4. Se jauh mana keterkaitan jumlah prasarana pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui se jauh mana angka partisipasi sekolah (APS) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui se jauh mana angka partisipasi kasar (APK) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui se jauh mana angka partisipasi murni (APM) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui se jauh mana keterkaitan jumlah prasarana pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber ilmiah bagi pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi pemahaman studi tentang kajian angka partisipasi sekolah (APS) setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman peneliti tentang angka partisipasi sekolah (APS) setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata S1 pada jurusan Geografi FIS UNP.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penduduk

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain resmi tinggal di wilayah tersebut dengan adanya bukti kewarganegaraan.

Menurut BPS, (2014) Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka berdomisili kurang 6 bulan dengan tujuan menetap sedangkan menurut UUD 1945 penduduk merupakan sekelompok orang atau warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayahnya tersebut dijadikan domisili atau wilayah sementara dan dapat tinggal secara menetap dan permanen.

Untuk meningkatkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Bukan hanya pendidikan dalam arti sempit sekolah, tetapi dalam arti luas mencakup pendidikan dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap prilaku yang berlangsung sejak dini melalui pendidikan sebagai proses tumbuh kembangnya budaya dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan penguasaan teknologi, kemampuan berkomunikasi dan mandiri (Subri, 2003).

2. Pendidikan

Menurut Muhibbin Syah, (2010) Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awal “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut pendidikan adalah proses pengebahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar bagi pembangunan suatu negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan pendidikan sebagai penyiapan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya (tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

Pendidikan menurut UU RI No.20 tahun 2003 bab 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan dirinya yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga pendidikan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional/negara. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, pelatihan,

proses, cara, dan perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Menurut Sedarmayanti, (2002) menjelaskan melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tau, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Pendidikan merupakan modal dasar bagi suatu pembangunan manusia. PBB mengungkapkan dalam pencapaian pembangua milenial ada 8 tujuan yang harus tercapai dan pada butir 2 yaitu mencapai pendidikan yang universal (UN, 2011). Indeks pendidikan menjadi menjadi salah satu indeks dalam pembangunan manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM suatu negara atau wilayah maka harus meningkatkan indikator indeks kesehatan dan indeks pendidikan.

Dalam UU NO 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional dalam delle, (1969) pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi anak melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut UNESCO ada 3 aspek atau indikator dalam pendidikan yaitu indikator akses dan pemerataan pendidikan, indikator mutu dan relevansi pendidikan, indikator manajemen pendidikan. Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui seberapa banyak anak yang belum terlayani atau mengenyam pendidikan setiap

kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan menurut UU NO 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 yaitu mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Sedangkan untuk jenjang pendidikan UU NO 20 Tahun 2003 pasal 14 terdiri atas : Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atau Madrasah Tsanawiyah (MtsN), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan Tinggi.

Menurut Barnawi. Dkk, (2012), Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka perlunya fasilitas prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, jalan dan bangunan sekolah. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses di sekolah, prasaran pendidikan utama untuk dapat menjalankan proses menemukan adanya pengaruh pembangunan sekolah terhadap angka partisipasi sekolah yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pendaftaran atau partisipasi siswa sejak pasca konstruksi. Ada beberapa faktor permintaan yang mempengaruhi dan menentukan tingginya tingkat angka partisipasi sekolah salah satunya yang mempengaruhi faktor permintaan angka partisipasi sekolah adalah jumlah sekolah (Dreher, 2006).

3. Partisipasi

Konsep partisipasi memiliki banyak makna. Beberapa defenisi di sajikan mulai dari penekanan pada rakyat yang memiliki peran untuk mengambil suatu keputusan atau yang memiliki kendali dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Paul dalam JimIfe (2008). Berbagai arti partisipasi tang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan membuat keputusan secara politis (JimIfe, 2008).

Partisipasi masyarakat (*social participation*) adalah suatu bentuk interaksi sosial dalam berbagai kegiatan. Definisi partisipasi masyarakat yang sudah diterima oleh PBB, sebagaimana dikutip dari Sugandhi (2009) adalah: *The creation of opportunities to enable all members of community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development.* Berkaitan dengan sifat-sifat partisipasi masyarakat, beberapa pakar menyebutkan ada partisipasi otonom yang dilakukan atas kesadaran ataukah partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*). Adanya perbedaan dua sifat tersebut bertumpu pada kerelaan atau keterpaksaan. Meskipun demikian, kedua sifat partisipasi masyarakat tersebut memiliki konsekuensi yang tidak berbeda, yaitu mempengaruhi proses penyelenggaraan dan proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan (Saifudin, 2009).

Dalam konteks mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi, yaitu sebagai berikut:

partisipasi masyarakat akan muncul ketika dirasa suatu aktivitas tersebut penting; adanya anggapan bahwa aksi partisipasi mereka akan membuat perubahan; berbagai bentuk partisipasi, apapun tingkatan dan jenisnya, harus diakui dan dihargai; orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya; dan struktur dan proses partisipasi tidak boleh mengucilkan sehingga masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol struktur dan proses tersebut (JimIfe, 2008).

Dengan demikian, proses partisipasi masyarakat akan lebih bermakna dan berkualitas ketika masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk turut serta dalam proses advokasi kebijakan publik. Memahami angka partisipasi dalam pendidikan tentu sangat penting bagi semua pihak sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka akan mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai. Dengan angka partisipasi, dapat diketahui pada karakter atau variable apa saja, ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan itu terjadi. Terlebih lagi pemerintah menerapkan kebijakan anggaran pendidikan 20% (APBN dan APBD). Dengan mengetahui partisipasi pendidikan akan mengetahui apakah anggaran pendidikan yang semakin besar berkorelasi positif terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang.

4. Partisipasi Pendidikan

Masalah partisipasi pendidikan berkenaan dengan rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap memasuki satuan-satuan pendidikan. Semakin besar kesenjangan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta didik dengan jumlah penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, semakin besar pula masalah partisipasi pendidikan.

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah (Dewi dkk, 2015). Angka partisipasi sekolah berguna untuk mengetahui usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu.

APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang di tempuh. Adapun rumus untuk menghitung APS adalah sebagai berikut :

$$APS_{7-12} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{APS 13-15} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$$

$$\text{APS16-18} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100$$

Keterangan :

SD : kelompok usia 7-12 tahun

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut BPS, (1994) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu yang digunakan untuk tujuan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

APK adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu di bandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. APK dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{APK SLTP} = \frac{\text{jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$$

$$\text{APK SLTA} = \frac{\text{jumlah penduduk yang sekolah di SLTA}}{\text{jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100$$

Keterangan :

SD : kelompok usia 7-12 tahun

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen. APM dapat menjadi lebih dari 100 persen kalau banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai.

Menurut BPS, (1994) APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur yang sesuai atau tepat waktu sesuai jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Dalam keputusan Kemendiknas no : 129a/U/2004 standar pelayanan minimal

masing-masing usia sekolah setiap jenjang pendidikan yaitu: SD 95%, SLTP 90%, SLTA 60% (Kemendiknas, 2004)

Angka partisipasi murni (APM) adalah adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. APM dapat di hitung menggunakan rumus :

$$\text{APM SD} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \dots(3)$$

$$\text{APM SLTP} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$$

$$\text{APM SLTA} = \frac{\text{jumlah penduduk 16-18 yang sekolah di SLTA}}{\text{jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100$$

Keterangan :

SD : kelompok usia 7-12 tahun

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun

Kriteria APM yaitu makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah dan jenjang pendidikan di suatu daerah.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan uraian tentang pendapat atau hasil penelitian yang terdahulu akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikemukakan dan hasil penelitian yang rasanya relevan dengan penelitian penulis antara lain :

Tabel 1. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti

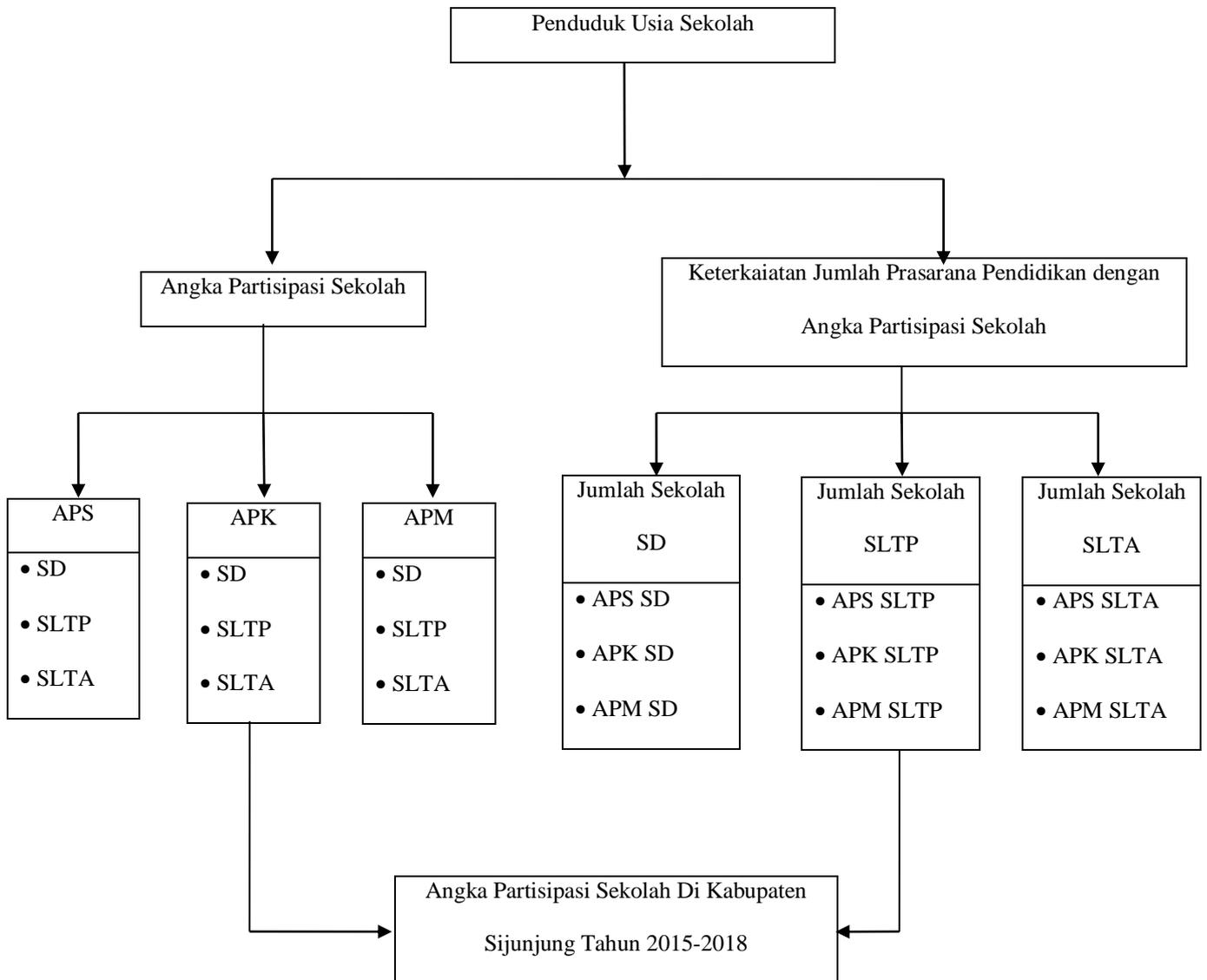
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Dengan Penulis
1	Desi Yulia, (2016)	Struktur penduduk Kabupaten Pasaman (analisis data sensus penduduk Tahun 2000 dan 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Pasaman tahun 2000 dan 2010 mengelompok pada usia produktif. Berdasarkan umur median, tergolong intermediet dan belum berada pada bonus demografi. 2. Struktur penduduk menurut jenis kelamin antara tahun 2000 dan 2010, yaitu penduduk terbanyak pada penduduk perempuan dengan sex rasio rata-rata 98,3 3. Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2000 dan 2010 secara keseluruhan nilai APK untuk tiap-tiap jenjang pendidikan mengalami penurunan artinya makin tinggi umur angka partisipasi sekolah makin kecil, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi 4. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Pasaman untuk periode tahun 2000 dan 2010 adalah sebesar-6,9% tergolong rendah hal ini diperkirakan karena terjadinya migrasi akibat pemekaran wilayah. 	Perbedaan semua penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini fokus menganalisis angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) dan melihat keterkaitan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) dengan jumlah prasarana pendidikan setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
2	Didi Prayitno, (2008)	Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (studi kasus di distrik Semangga Kabupaten Merauke).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun masih rendah. 2. Pandangan orang tua tentang nilai anak dalam program wajib belajar 9 tahun masih Sangat rendah. 3. Persepsi orang tua tentang pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun masih Sangat rendah. 4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih sangat rendah 	
3	Dwi Jatmiko (2012)	Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak pada Keluarga Buruh Batik, Petani, dan Nelayan di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan buruh batik, petani, dan nelayan terhadap tingkat pendidikan anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosial ekonomi sedang : Petani : 55,00 %, Buruh batik : 46,67 %, Nelayan : 48,57 % 2. Tingkat pendidikan rendah : Petani : 60,00%, Buruh batik : 46,67%, Nelayan : 54,00% 3. Terdapat pengaruh yang signifikan : Petani : 93,7%, Buruh batik : 62,8% , Nelayan : 55,5% 	

Dari semua hasil penelitian di atas penulis rasa relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena dari semua kajian penelitian di atas mengkaji mengenai angka partisipasi sekolah. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.

C. Kerangka Konseptual

Masalah penduduk di Indonesia yang paling mendasar adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya, tidak meratanya distribusi penduduk antar wilayah dan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat angka partisipasi sekolah di Indonesia yang tidak merata setiap wilayah. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka perlunya fasilitas prasarana pendidikan seperti halaman, jalan dan bangunan sekolah.

Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terdiri atas: Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atau Madrasah Tsanawiyah (MtsN), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan Tinggi. Untuk melihat dan mengukur pemerataan pendidikan di Indonesia di gunakan perhitungan melalui angka partisipasi sekolah (APS) yang merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah. Kerangka konseptual untuk penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, analisis data, dan pembahasan pada bab IV, kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata APS SD adalah 99,13%, rata-rata APS SLTP adalah 90,53%, rata-rata APS SLTA adalah 70,77% setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
2. Rata-rata APK SD adalah 107,79%, rata-rata APK SLTP adalah 82,32%, rata-rata APK SLTA adalah 73,52% setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
3. Rata-rata APM SD adalah 96,46%, rata-rata APM SLTP adalah 79,11%, rata-rata APM SLTA adalah 55,87% setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018.
4. Keterkaitan jumlah prasarana pendidikan atau jumlah sekolah dengan APS, APK, APM setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018 yaitu semakin banyak jumlah prasarana pendidikan atau jumlah sekolah maka cenderung APS, APK, APM juga akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin sedikit jumlah sekolah maka APS, APK, APM cenderung semakin rendah dan jumlah prasarana pendidikan atau jumlah sekolah berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan dan APS,

APK, APM juga akan berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan dari jenjang pendidikan SD ke SLTP ke SLTA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kepala sekolah agar dapat memajemen berbasis sekolah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.
2. Disarankan kepada Dinas Kemendikbud Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan jumlah prasarana pendidikan agar dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak terutama saat anak dalam usia sekolah.
4. Disarankan kepada orang tua untuk dapat memperhatikan kebutuhan anak dalam menjalankan proses belajar serta bisa menjadi guru bagi anak di luar sekolah dan memonitor pekerjaan sekolah anak dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah. 2015. *Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin*. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 3 Nopember 2015.
- Anis Joli Koto. 2015. *Pengaruh Lokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pendidikan Kepala rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. *Ekonomi Education* Vol.3 No.2 (169-184). (Jurnal).
- Barnawi. Dkk, 2012. <https://www.asikbelajar.com/pengertian/-prasarana-dan-sarana/>. (Diakses 17 Juni 2019)
- Berlian,NurVa.2011.*Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. (Jurnal).
- BPS.2014.*PengertianPendudukdanWargaNegara*.[Http://Genggaminternet.Com/Pengertian-Penduduk-Dan-Warga-Negara/](http://Genggaminternet.Com/Pengertian-Penduduk-Dan-Warga-Negara/).(Diakses 25 April 2019)
- BPS. 2017. *Kabupaten Sijunjung dalam angka 2017*. (Diakses 7 Mei 2019)
- BPS.1994. *Indonesia Dalam Angka*. (Diakses 7 Mei 2019)
- BPS. 2018. *Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2018*.(Buku Statistik)
- Dalle. 1969. *Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat Di Indonesia Tahun 2006-2012*. (Jurnal)
- Dewi. Dkk.2015.*Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. Vol. 10, No. 1 (2018).
- Dreher. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia*. (Skripsi).

- Elfarabi, Muhammad Fachry. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Di Indonesia*.(Skripsi).
- Hakim. 1982.*Struktur Penduduk Kabupaten Pasaman (Analisis Data Sensus Penduduk Tahun 2000 Dan 2010)*.Skripsi Geografi Fis Unp.
- Hartono Djoko. 2008. *Akses Pendidikan Dasar Dari Segi Transisi SD ke SMP*. Vol. III, No.2, 2008. (Artikel).
- Istiqomah Anny, dkk. 2018. *Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*. Volume12 Nomor 2 ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 |. (Jurnal).
- Jimife. 2008. *Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin*.Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan.Vol. 2 No. 3 Nopember 2015, Hal 231-239. (Jurnal).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin*.Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 3 Nopember 2015, Hal 231-239.
- Karini. 2018. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. (Jurnal).
- Kemendikbud. 2018. *Kabupaten Sijunjung*. (Buku pendidikan)
- Kemendiknas. 2004. *Standar Pelayanan Minimal*.(Diakses 7 Mei 2019)
- Khairunnisaa. Dkk. 2014. *Determinan Angka Partisipasi Sekolah Smp Di Jawa Barat Determinant Of Junior Secondary School Enrollment Rate In West Java*. (Jurnal).

- Muhubbin Syah, 2010. *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musianto. 2002. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. Vol. 10, No. 1 (2018).
- Neilson and Zimmerman. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan Vol. 01 No. 02 November 2017 Hal. 127 – 140.
- Noname. <https://Docplayer.Info/399023-Gambaran-Umum-Kondisi-Daerah.Html> (Diakses 25 April 2019).
- Noname. <http://www.sijunjung.go.id/v2/sekilas-sijunjung/geografis/>. (Diakses 4 Juli 2019)
- Purwadi Dan Siswantari. 2002. *Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2011
- Purwanto, D. A. 2010. *Desentralization and Its Impact On Primary education Outcomes*. *Journal Of Indonesia Economy and Business*, 25 (1), 41-58. (Jurnal).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardja, Prathama. 2004. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Rahmatika, Hamzulida Rizqia. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (Apk) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2015*. (Skripsi).
- Saifudin.2009.*Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin*.Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan.Vol. 2 No. 3 Nopember 2015, Hal 231-239.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sejarah Kabupaten Sijunjung. <http://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1576/sejarah-kabupaten-sijunjung.html>. (Diakses 4 Juli 2019)
- Soejoto, Ady. 2017. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya*. (Jurnal).
- SusiHs. 2019. <https://Cakrawala82.Blogspot.Com/2018/01/Teori-Kependudukan-Menurut-Para-Ahli.Html>(Diakses 25 April 2019).
- Subri.2003.<https://Cakrawala82.Blogspot.Com/2018/01/Teori-Kependudukan-Menurut-Para-Ahli.Html> (Diakses 25 April 2019)
- UU No. 20 Tahun 2003. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. Vol. 10, No. 1 (2018).
- W.Gulo. 2002. *Metode Penelitian*.Jakarta: Pt.Grasindo
- Yulia, Desi. 2016. *Struktur Penduduk Kabupaten Pasaman (Analisis Data Sensus Penduduk Tahun 2000 Dan 2010)*. (Skripsi)

Zimmerman dan Neilson. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. Vol. 10, No. 1 (2018).

Zulfa Ummi Ramatin. 2017. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan. Vol.01 No.02 November 2017 Hal. 127-140. (Jurnal).